

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan arus informasi di era globalisasi saat ini menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia berlomba-lomba untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata sosial masyarakat agar perusahaan dapat menarik para investor dan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat meningkatkan performa perusahaan dimasa mendatang dan mempertahankan keberlangsungan hidup bisnisnya. Namun disisi lain, demi untuk mendapatkan keuntungan yang besar tidak jarang perusahaan memberikan dampak buruk bagi sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan, seperti pencemaran limbah pabrik yang mengotori aliran air masyarakat, keracunan makanan, polusi dan produksi makanan yang mengandung zat berbahaya bagi tumbuh masyarakat. Akibat dari dampak buruk tersebut menyebabkan masyarakat menuntut perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan emitmen terbesar yang ada

di Bursa Efek Indonesia (**Fajarini, 2012**) dan merupakan sektor industri yang dianggap paling sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan sehingga mempunyai pengaruh atau dampak terhadap lingkungan sekitarnya sebagai akibat dari yang dilakukan perusahaan (**Tamba, 2011**).

Sebagian perusahaan di Indonesia mulai menyeimbangkan antara orientasi keuntungan dan perbaikan lingkungan. Konsep *Triple Bottom Line* (profit, planet, people) dianggap sebagai pilar utama dalam membangun bisnis keberlanjutan serta untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (**Idah, 2013**). Dengan adanya konsep 3P tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan pertanggung jawaban sosial (Corporate Social Responsibility) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keberlangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Seiringi dengan adanya perkembangan CSR, perusahaan mulai menyadari untuk mengungkapkan sebuah laporan yang tidak hanya berpijak pada kondisi keuangan saja tetapi juga berpijak pada penyediaan sosial dan lingkungan yang kemudian disebut *sustainability report*.

Sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal (Suryono dan Pratiwi, 2011). Penyusunan *sustainability report* harus berdasarkan pada kerangka pelaporan yang disusun oleh *Global Report Investment* (GRI) (Suryono dan Pratiwi, 2013). Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia didukung oleh sejumlah peraturan pemerintah, diantaranya Undang-Undang No. 23 tahun 1997 mengenai lingkungan. Undang-Undang No. 40 pasal 66 ayat 2 dan pasal 74 tahun 2007 mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (Widianti, 2011). Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) NO. 1 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan sosial dalam laporan tambahan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (Kamil dan Herusetya, 2012).

Global Report Investment (2013) mendefinisikan *sustainability report* sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan

sebagai tanggung jawab kepada seluruh stakeholders mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Global Report Investment* (GRI) merupakan salah satu organisasi internasional yang aktivitas utamanya difokuskan pada pencapaian transparansi dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan standar dan pedoman pengungkapan *sustainability report*.

Pengungkapan *sustainability report* yang sesuai dengan GRI harus memenuhi beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam GRI-G4 *Guidelines* yaitu keseimbangan, dapat dibandingkan, akurat, urut waktu, kesesuaian, dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun pengungkapan standar dalam *sustainability report* menurut GRI-G4 *Guidelines* terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

Di Indonesia, *sustainability report* masih bersifat voluntary dan masih dalam tahap pengenalan, masih sedikit perusahaan yang tertarik untuk mengungkapkan *sustainability report*. Perusahaan go public yang melakukan pengungkapan *sustainability report* sampai diadakan ISRA pada tahun 2012

hanya 31 perusahaan atau setara dengan 7,35% dari total perusahaan yang listed di BEI. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran perusahaan mengenai manfaat dari pengungkapan *sustainability report* (**Adhipradana, 2013**).

Laporan lanjutan (sustainability report) adalah laporan terukur yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. *Sustainability report* juga menyajikan nilai-nilai dan model tata kelola perusahaan serta menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Laporan ini merupakan elemen intrinsik dari pelaporan terintegrasi dan perkembangan yang lebih baru yang menggabungkan analisis kinerja keuangan dan non-keuangan baik informasi kualitatif maupun informasi kuantitatif. Di berbagai negara maju di kawasan Eropa seperti Swedia, Finlandia, Belanda, dan Jerman serta negara Asia seperti Jepang sudah mewajibkan setiap perusahaan, baik perusahaan milik negara maupun perusahaan terbuka untuk membuat *sustainability report*. Tidak heran jika negara tersebut mendapat

nilai dan peringkat yang tinggi dalam *Environmental Performance Index* (EPI). Bahkan menurut survei dari Value Champion Jepang termasuk dalam negara yang paling ramah lingkungan di tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang menempati urutan ke-133 dari 180 negara dalam EPI.

Sudah seharusnya pemerintah mengatur keberadaan dari laporan keberlanjutan ini, karena belum adanya standar yang berlaku menyeluruh di Indonesia membuat minimnya kesadaran perusahaan di Indonesia untuk mempublikasikan *Sustainability Report*. Pembuatan regulasi dan standar yang berlaku pada seluruh perusahaan di Indonesia akan menjadi hal penting sebagai dasar dan pedoman perusahaan-perusahaan untuk membuat pelaporan keberlanjutannya. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan dan standar tersebut berdasarkan karakteristik ukuran perusahaan dan tingkat sensitivitasnya karena berdasarkan penelitian dari Kilic dan Kuzey tahun 2017. Ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Walaupun terasa sulit, namun masih ada waktu bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang ada demi

mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable developmen goal 2030* mendatang.

Kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan laporan yang bersifat sukarela seperti laporan keberlanjutan masih sangat kurang. Dari 438 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya 25 perusahaan yang membuat *sustainability report*. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan enggan membuat *sustainability report*. Pertama yaitu perusahaan tidak transparan dalam menjalankan bisnisnya, dan tidak memiliki komitmen menjadi perusahaan *Good Corporate Governance*. Faktor kedua yaitu perusahaan menganggap *sustainability report* sebagai sebuah biaya tambahan. Sedangkan yang ketiga yaitu, belum ada suatu peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan untuk merilis *sustainability report*. Lain halnya yang terjadi di beberapa negara lain seperti Swedia, Belanda, Jepang, Afrika Selatan dan China. Di negara-negara tersebut, pemerintah setempat sudah mewajibkan setiap perusahaan, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan terbuka untuk membuat *sustainability report* (www.investasi.kontan.co.id , 21 Desember 2011). Perkembangan *sustainability reporting* di Indonesia dimulai

tahun 2005, ada satu perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, Pada tahun 2014 (www.ncsr-id.org) dan kini telah tercatat sebanyak 104 perusahaan yang telah menerbitkan laporan berkelanjutan. Meningkatnya minat perusahaan terhadap sustainability reporting dari tahun ke tahun disebabkan oleh kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan ini terjadi akibat banyaknya kasus ketidakpedulian beberapa perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat dari aktivitas operasi perusahaan.

Fenomena perusahaan yang tidak melaporkan informasi mengenai tanggung jawab sosialnya yaitu PT. Chevron. Sejak pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), perusahaan migas PT. Chevron yang beroperasi di terminal Lawe Lawe, tidak pernah melaporkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada DPRD. Karena tidak pernah melaporkan ke DPRD maka pihak DPRD menilai bahwa PT. Chevron tidak pernah melaksanakan kegiatan CSR di wilayah PPU. Dalam pelaksanaan CSR ada kewajiban dari perusahaan untuk berkoordinasi dengan aparaturnya setempat

baik camat, lurah, kades hingga RT, termasuk lembaga masyarakat di wilayah tersebut (www.korankaltim.com, 16 Januari 2015).

Fenomena selanjutnya adalah perusahaan yang tidak melaporkan aktivitas pengelolaan lingkungan. Salah satu aktivitas pengelolaan lingkungan yang harus diungkapkan dalam *sustainability report* adalah mengenai pengelolaan limbah beracun yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. PT. Newmont Minahasa Raya (PT . NMR) tidak pernah melaporkan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahayanya (B3) kepada pemerintah. Padahal laporan pengolahan limbah beracun itu untuk mengetahui secara spesifik buangan limbah dari setiap perusahaan apakah memenuhi standar atau tidak. Hasil laporan audit internal Newmont yang mengakui perusahaan Amerika Serikat ini membuang 17 ton merkuri ke udara selama 4 tahun operasinya di Indonesia. Newmont mengakui telah membuang bahan beracun ke udara dan Teluk Buyat selama 4 tahun. Tapi menurut juru bicara Newmont Indonesia 17 ton bahan beracun itu masih di bawah ambang batas yang berlaku di Indonesia maupun Amerika. (www.tempo.co , 25 Desember 2004).

Pada kasus PT. Chevron, pengungkapan informasi tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas perusahaan. Aktivitas tersebut juga perlu dilaporkan melalui laporan tanggung jawab sosial yang disajikan dalam annual report, atau perusahaan dapat menyajikan laporan tanggung jawabnya melalui *sustainability report* sebagai laporan yang terpisah dari annual report (**Idah, 2013**).

Sedangkan untuk kasus PT. Newmont, peraturan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diatur dalam PP No. 18 tahun 1999. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Selanjutnya adalah fenomena mengenai aspek ekonomi yaitu kasus Koperasi Cipaganti. Hakim pengawas pada Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat didesak untuk menginvestigasi aset milik *Koperasi Cipaganti Karya Guna*

Persada (KCKGP) yang diduga disembunyikan. Kasus ini bermula dari penurunan leverage sehingga koperasi terpaksa menunda pembayaran bagi hasil pada investor. Aset-aset Cipaganti Group diduga sengaja tidak dimunculkan dalam restrukturisasi koperasi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembalikan uang para mitra usaha (www.okezone.com , 14 Juli 2014).

Pengungkapan mengenai informasi aspek ekonomi dalam sustainability report diantaranya mengenai kinerja ekonomi yang berkaitan dengan perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah (GRI, 2006). Dalam kasus koperasi Cipaganti tersebut dapat dilihat bahwa karena adanya penurunan kinerja keuangan yaitu kesulitan untuk membayar bagi hasil dengan investor membuat pihak Cipaganti Group diduga berusaha melindungi dan menyembunyikan aset yang terkait dengan koperasi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengembalikan uang mitra usaha. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa penurunan kinerja keuangan membuat perusahaan tidak transparan dalam mengungkapkan

informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Banyak sedikitnya aktivitas perusahaan dicerminkan berdasarkan besar atau kecilnya ukuran perusahaan (Yahya, 2007 dalam Oktafianti, 2015).

Ukuran perusahaan dapat luasnya pengungkapan perusahaan, hal ini dikarenakan besarnya suatu perusahaan menunjukkan banyaknya aset perusahaan yang dilibatkan dalam aktivitas operasi perusahaan yang mana aktivitas operasi perusahaan sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan, sosial serta perekonomian masyarakat. Semakin besar suatu perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas. Fenomena selanjutnya adalah mengenai lambatnya pelaporan kecelakaan kerja PT. Pertamina. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai belum menerima laporan resmi terkait kronologis kecelakaan kerja yang terjadi di kilang PT. Pertamina RU II. Pertamina RU II Dumai dinilai lamban melaporkan kasus kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi menunjukkan bahwa panitia Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja (K3) di perusahaan bersangkutan tidak berjalan. Perusahaan sebesar Pertamina RU II

Dumai hanya memiliki satu orang ahli K3 bernama Syahril yang tidak ada di tempat saat terjadi kecelakaan (www.halloriau.com, 29 November 2013).

Pertamina adalah perusahaan milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan dan pengiriman (www.indonesia-investments.com). Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang berhasil masuk pada daftar 500 Perusahaan Terbesar Global tahun 2013 (Fortune Global 500), yang dirilis majalah Fortune. BUMN minyak itu berhasil menduduki posisi 122 dari 500 perusahaan terbesar di seluruh dunia (kompas.com). Berdasarkan pernyataan tersebut sudah suatu kewajiban bagi PT. Pertamina untuk mengungkapkan segala informasi mengenai aktivitas usahanya termasuk praktik ketenagakerjaan. PT. Pertamina sebagai perusahaan besar diharapkan dapat mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena memiliki jumlah stakeholder yang besar dan menuntut pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan

perusahaan. Informasi mengenai kecelakaan kerja yang terjadi juga harus diungkapkan, salah satu media pengungkapannya dapat melalui *sustainability report*. Dalam *sustainability report* pengungkapan mengenai kecelakaan kerja termasuk dalam aspek sosial yaitu praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. Laporan keberlanjutan harus menyediakan informasi mengenai kontribusi perusahaan baik positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Pengungkapan *sustainability report* dapat meningkatkan dan kinerja keuangan karena melalui laporan ini para stakeholder bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terbuka mengenai segala kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas dan leverage merupakan bagian dari kinerja perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dalam menentukan pengambilan keputusan, para stakeholder memerlukan informasi terkait dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan (*financial report*). Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran tertentu yang digunakan oleh

suatu entitas untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan laba. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajiban terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan dapat dicerminkan melalui rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. Perhitungan rasio-rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan antara lain: rasio profitabilitas dan leverage keuangan.

Profitabilitas merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat diproksikan dengan laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba dari kegiatan utama perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin rinci informasi yang disampaikan dalam pengungkapan *sustainability report* kepada para stakeholder.

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan akan bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki proporsi hutang yang tinggi, sehingga biaya monitoringnya akan tinggi juga (**Jensen dan Meekling, 1976; dalam Sari dan Marsono, 2013**). Pengungkapan *sustainability report* memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela terutama terpisah dari *annual report* (**Sari dan Marsono, 2013**). Hal tersebut akan memiliki efek negatif dalam pengungkapan *sustainability report*.

Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Menurut Machfoed (1998; dalam Widiyanto, 2011), ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut total assets perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas. Selain itu perusahaan besar juga dianggap memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengungkapan *sustainability report*, karena

pengungkapan *sustainability report* membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang lebih besar. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari *total assets* yang dimiliki perusahaan.

Di Indonesia, penelitian mengenai *sustainability report* masih sangat jarang, hal ini yang mendasar perlunya penelitian-penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami bagaimana karakteristik, manfaat, maupun hal lain terkait dengan pengungkapan *sustainability report* yang masih belum teroptimalisasi sepenuhnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. untuk mendapatkan keuntungan yang besar tidak jarang perusahaan memberikan dampak buruk bagi sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan, seperti pencemaran limbah pabrik yang mengotori aliran air masyarakat, keracunan makanan, polusi dan produksi makanan yang mengandung zat berbahaya bagi tumbuh masyarakat.
2. Pengungkapan sustainability report di Indonesia didukung oleh sejumlah peraturan pemerintah, diantaranya Undang-Undang No. 23 tahun 1997 mengenai lingkungan. Undang-Undang No. 40 pasal 66 ayat 2 dan pasal 74 tahun 2007 mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Laporan keberlanjutan harus menyediakan informasi mengenai kontribusi perusahaan baik positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

4. Adanya penurunan kinerja keuangan membuat perusahaan tidak transparans dalam mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
5. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin rinci informasi yang disampaikan dalam pengungkapan sustainability report kepada para stakeholder.
6. Pengungkapan sustainability report memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela terutama terpisah dari annual report.
7. Ukuran perusahaan dapat luasnya pengungkapan perusahaan, hal ini dikarenakan besarnya suatu perusahaan menunjukkan banyaknya aset perusahaan yang dilibatkan dalam aktivitas operasi perusahaan sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial, serta perekonomian masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report cakupannya yang sangat luas, untuk itu peneliti membatasi masalah

variabel yang digunakan seperti kinerja keuangan dan ukuran perusahaan. Dalam objek penelitian seperti perusahaan yang listing di BEI yang mencapai sekitar 600 lebih perusahaan yang listing di BEI, peneliti membatasi objek tersebut sehingga objek yang diambil dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang listing di BEI serta periode waktu yang diambil dalam penelitian ini hanya 5 tahun terakhir (2014-2018).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana tingkat profitabilitas (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
2. Bagaimana tingkat leverage (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

3. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
4. Bagaimana tingkat profitabilitas dan leverage (kinerja keuangan), dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
5. Bagaimana tingkat profitabilitas (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan Nilai perusahaan sebagai variabel kontrol di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
6. Bagaimana tingkat leverage (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan Nilai perusahaan sebagai variabel kontrol di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
7. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan Nilai perusahaan sebagai variabel kontrol di

perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

8. Bagaimana tingkat profitabilitas dan leverage (kinerja keuangan), dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan nilai perusahaan sebagai variabel control di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?
9. Bagaimana nilai perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan nilai perusahaan sebagai variabel control di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat profitabilitas (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat leverage (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat profitabilitas dan leverage (kinerja keuangan), dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat profitabilitas (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan Nilai perusahaan sebagai variabel kontrol di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
6. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat leverage (kinerja keuangan) berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan Nilai

perusahaan sebagai variabel kontrol di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

7. Untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan Nilai perusahaan sebagai variabel kontrol di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
8. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat profitabilitas dan leverage (kinerja keuangan), dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report dengan nilai perusahaan sebagai variabel kontrol di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
9. Untuk mengetahui pengaruh dari nilai perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report di perusahaan manufaktur sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sustainability repor.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan saran bagi pihak manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan Sustainability Report khususnya yang berhubungan dengan Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, dan Ukuran Perusahaan.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Penelitian Lainnya

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama serta menjadi salah satu tambahan informasi yang berguna bagi siapa saja yang membacanya.